

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, TAHUN 2014 - 2018

Sasa Wulandari
Rudy Badrudin

E-mail: sasawulan.sw@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of local revenue and equalization fund on the economic growth with capital expenditures as an intervening variable in the Pesisir Selatan Regency. The type of data in this study is secondary data sourced from reports on the realization of the APBD and economic growth data in Pesisir Selatan Regency from 2014 to 2018. This study used the partial least square method. The data analysis technique using is quantitative data analysis. The results of this study indicate that local revenue had a negative and insignificant effect on capital expenditure, equalization fund had a positive and insignificant effect on capital expenditure and capital expenditure cannot be an intervening variable in the relationship between original regional income and balance funds on economic growth.

Keywords: local revenue, equalization fund, capital expenditures, economic growth

JEL classification: O16, H72, R11

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan kebijakan terkait otonomi

daerah yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015. Pembentukan daerah otonom dengan kewenangan menetapkan pokok aturan rumah tangga sendiri dimaksudkan supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan wilayah dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu bagian dari pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilakukan dengan pengalokasian dana pada belanja modal. Dampak langsung manfaat dari belanja modal yang berkaitan dengan masyarakat adalah penyediaan infrastruktur yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, karena sangat menentukan jumlah, kekuatan, dan kapasitas finansial daerah. Jumlah total pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain PAD, terdapat dana perimbangan yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan bertujuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dana perimbangan merupakan indikator penting lainnya sebagai sumber pendukung pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan

yang berkontribusi besar pada struktur APBD.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah *et al.*, 2020) Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten dan Kota dilakukan secara acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05 yang menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan & Karmini, 2013) memperoleh kesimpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, (Salim, 2019) melakukan penelitian dengan kesimpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Kemudian, (Ernita *et al.*, 2020) juga melakukan penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga memiliki hubungan berpengaruh tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut juga memperoleh kesimpulan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah hasil pemungutan yang berupa pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dirancang sebagai perwujudan desentralisasi fiskal untuk membebaskan daerah dalam mengeksplorasi pendanaan pada penyelenggaraan otonomi (Badrudin, 2017). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah sebagai elemen pendapatan asli daerah memiliki potensi lebih besar untuk memaksimalkan mobilisasi dibandingkan dengan komponen pendapatan asli daerah lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terutama karena kapasitas pemungutan pajak daerah mempunyai karakteristik yang jelas baik secara teoritis, politik dan implementasinya (Pajak Daerah, 2018).

Dana Perimbangan

Menurut (Badrudin, 2017) dana Perimbangan pada kelompok pendapatan daerah merupakan pengalokasian pendapatan APBN kepada daerah untuk pendanaan kepentingan daerah pada penerapan desentralisasi. Pengalokasian dana perimbangan setiap tahun ditetapkan melalui APBN yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang pengalokasian kepada daerah yang berlandaskan pada persentase tertentu yang berasal dari APBN untuk pendanaan keperluan daerah pada penyelenggaraan desentralisasi (Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, Dan Jenis, 2017). Sedangkan, Dana Alokasi Umum merupakan transfer pendapatan APBN oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk pemerataan kapasitas finansial antar daerah dalam membiayai penyelenggaraan desentralisasi yang pengalokasiannya berlandaskan celah fiskal dan alokasi dasar. Komponen dana perimbangan yang terakhir yaitu Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008) dalam Badrudin (2017) yakni anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun akuntansi. Be-

lanja modal dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembangunan yang bersinggungan dengan pelayanan publik tidak ditujukan kepada masyarakat perorangan Hoesada (2016) dalam (Moha *et al.*, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan pendapatan masyarakat pada suatu daerah, yaitu peningkatan semua nilai tambah yang berlangsung pada daerah tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian salah satunya dindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi. Komponen utama pertumbuhan ekonomi terdiri dari akumulasi modal, peningkatan populasi dan angkatan kerja, dan pertekembangan teknologi (Todaro & Smith, 2015) dalam (Albari, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan PDB atau PDRB pada wilayah tertentu. Keadaan perekonomian daerah dapat digambarkan dengan PDRB pada periode tertentu, baik menggunakan ADHB maupun ADHK. Perkembangan PDRB ADHB dari tahun ke tahun merefleksikan perkembangan yang disebabkan perubahan volume produksi barang dan jasa serta perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karena itu, PDRB ADHK digunakan untuk mengukur perkembangan produktivitas secara nyata dengan menghilangkan faktor pengaruh harga dalam perhitungannya. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Sebagai salah satu sumber belanja modal maka PAD memiliki peran penting untuk pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil penelitian (Fatimah *et al.*, 2020) Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten dan Kota dilakukan secara acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05 menunjukkan besar kecilnya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan

& Karmini, 2013) memperoleh hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. (Salim, 2019) juga melakukan penelitian dan mendapatkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Dana perimbangan yang merupakan pengalokasian dana dari APBN untuk daerah bertujuan untuk pendanaan kebutuhan daerah salah satu pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan belanja modal. Penelitian Irvan & Karmini (2013) mendapatkan kesimpulan dana perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Menurut penelitian yang juga dilakukan oleh (Salim, 2019) dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun belanja modal digunakan untuk pelayanan publik. Penelitian Irvan & Karmini (2013) berkesimpulan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening. Pada penelitian Ernita *et al.* (2020) menyimpulkan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar uraian di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Penelitian ini menggunakan data populasi dari Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018.

Data tersebut terdiri dari (1) realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 – 2018 (2) realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018 (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018 (4) realisasi Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Data diunduh dari situs Badan Pusat Statistika (bps.go.id) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu.go.id). Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0 dan menggunakan teknik analisis jalur (*Path Analysis*).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen, variabel endogen dan variabel intervening. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan digunakan sebagai variabel eksogen. Variabel endogen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening. Belanja Modal digunakan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini karena salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi menurut (Todaro & Smith, 2006) adalah akumulasi modal. Akumulasi modal digunakan untuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan output. Peningkatan output tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi jika tidak didukung investasi lainnya. Investasi lainnya yang dimaksud adalah infrastruktur ekonomi dan sosial seperti fasilitas transportasi. Anggaran pendanaan yang digunakan untuk investasi yang bersinggungan dengan peningkatan infrastruktur adalah belanja modal, maka dengan alasan tersebut belanja modal ditetapkan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Data yang digunakan terdiri dari data pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan

tahun periode 2014 – 2018. Total terdapat 5 butir data yang diteliti pada setiap variabel. Tabel 1 yang disajikan berisi informasi analisis statistika deskriptif dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Berdasar Tabel 1, nilai minimum PAD adalah Rp86.699.821.743 yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini bisa dikarenakan belum optimalnya peningkatan pada sektor pariwisata yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, meskipun jika dikomparasi dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan signifikan. Sedangkan, nilai maksimum PAD adalah Rp176.902.866.674 yang terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kenaikan PAD disebabkan oleh meningkatnya lain-lain pendapatan yang sah secara signifikan. Nilai rata-rata PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun adalah Rp120.883.305.597. Standar deviasi PAD Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rp34.004.632.633. Berdasar Tabel 1, nilai minimum Dana Perimbangan adalah Rp885.519.612.210 yang terjadi pada tahun 2014. Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun terdapat komponen yang jumlahnya menurun yaitu Dana Bagi Hasil. Hal ini dikarenakan karena pajak penghasilan/komponen bukan pajak yang masuk ke dalam alokasi DBH menurun. Sedangkan, nilai maksimum Dana Perimbangan adalah Rp1.138.072.698.530 yang terjadi pada tahun 2016. Nilai rata-rata Dana Perimbangan adalah Rp1.036.858.881.025 dan nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah Rp118.911.675.095.

Berdasar Tabel 1, nilai minimum Belanja Modal adalah Rp213.290.586.988 yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 alokasi PAD dana Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal relatif kecil karena PAD dan Dana Perimbangan minimum juga terjadi pada tahun ini. Nilai maksimum Belanja Modal adalah Rp283.996.000.000 yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini disebabkan alokasi terhadap

Tabel 1
Analisis Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
PAD (Rp)	5	86.699.821.743	176.902.866.674	120.883.305.597	34.004.632.633
DP (Rp)	5	885.519.612.210	1.138.072.698.530	1.036.858.881.025	118.911.675.095
BM (Rp)	5	213.290.5886.988	283.996.000.000	257.721.192.466	27.575.039.563
PE (%)	5	5,33%	5,80%	5,53%	0,22%

peningkatan infrastruktur pada sektor pariwisata yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata. Nilai rata-rata Belanja Modal adalah Rp257.721.192.466 dan nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah Rp27.575.039.563.

Berdasar Tabel 1, nilai minimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,33% yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan melambatnya sektor primer yaitu sektor pertanian dan perkebunan, selain itu sektor industry pertumbuhannya negatif. Nilai maksimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,80% yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan indikator makro pembangunan yang memiliki tren peningkatan berkesinambungan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Kemanusiaan yang berakibat menurunnya tingkat kemiskinan. Nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,53% dan nilai standar deviasi Pertumbuhan

Ekonomi adalah 0,22%.

Tabel 2
Nilai R-square

	R-Square
Belanja Modal	0,337
Pertumbuhan Ekonomi	0,199

Nilai R-square digunakan untuk pengevaluasian model struktural. Berdasar Tabel 2 tersebut, variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 33,7%, sedangkan 62,3% dijelaskan oleh faktor lain. Variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal sebesar 19,9% sedangkan 80,1% dijelaskan oleh faktor lain.

Tabel 3
Path Coefcient

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T-Statistic	P Values
BM → PE	-0,446	-0,514	0,406	1,097	0,299
DP → BM	0,603	-0,704	3,675	0,164	0,873
PAD → BM	-0,033	1,322	3,643	0,009	0,993

Berdasar Tabel 3, hasil pengolahan data dapat digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat original sample, T-Statistic dan P Values. Signifikansi

dalam penelitian ini dapat diterima apabila P Values < 0,05. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini:

Tabel 4
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	Original Sample	T-Statistic	P Values	Simpulan
H1	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	-0,446	1,097	0,299	Ditolak*)
H2	Dana Perimbangan berpengaruh positif Belanja Modal	0,603	0,164	0,873	Ditolak*)
H3	Belanja Modal berpengaruh negatif Pertumbuhan Ekonomi	-0,033	0,009	0,993	Ditolak*)

*) Catatan: > 0,05

Berdasar Tabel 4, dapat diketahui bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, semuanya ditolak karena masing-masing pengaruh yang ditunjukkan memiliki nilai P Values > 0,05. Sehingga dapat dinyatakan hubungan setiap variabel independen ke variabel dependen memiliki hubungan yang tidak signifikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasar hasil yang peneliti peroleh melalui hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Simpulan tersebut memiliki arti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat menjadi penentu besarnya belanja modal karena pendapatan asli daerah yang diterima rendah. Hal ini dapat terjadi karena belum tercapainya tujuan pembangunan daerah yang terlihat dari penerimaan komponen PAD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa pendapatan retribusi mengalami penurunan dan pajak belum mencapai target.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil penelitian (Ernita *et al.*, 2020) yang berkesimpulan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini juga membantah penelitian yang dilakukan (Irvan & Karmini, 2013) yang berkesimpulan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan penelitian (Wati & Fajar, 2017) yang memiliki kesimpulan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasar hasil pengujian yang peneliti peroleh pada Tabel 4 memiliki kesimpulan hipotesis kedua ditolak. Simpulan tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Hasil tersebut diperoleh karena tidak semua dari komponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja modal. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh pengalokasian dari komponen dana perimbangan yang digunakan untuk pendanaan belanja modal belum dikelola secara maksimal untuk

peningkatan infrastruktur.

Simpulan ini tidak satu pendapat dengan penelitian Wati & Fajar (2017) yang memperoleh kesimpulan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini satu pendapat dengan penelitian Ernita *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan penelitian ini juga satu pendapat dengan hasil penelitian Irvan & Karmini (2013) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasar hasil yang diperoleh peneliti ditunjukkan pada Tabel 4 maka hipotesis ketiga ditolak. Simpulan tersebut menunjukkan belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Pengaruh negatif ini berkaitan dengan belanja modal sebagai variabel intervening terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hubungan PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena hubungan tidak langsung antara dana perimbangan melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat negatif. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap belanja modal karena tidak semua komponen penyusunnya digunakan untuk belanja modal. Komponen DAK saja yang pengalokasiannya digunakan untuk perbaikan infrastruktur agar perekonomian dapat berjalan lebih lancar. Sedangkan, hubungan tidak langsung antara PAD melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif karena pendanaan utama belanja modal berasal dari pendapatan daerah.

Hasil penelitian satu pendapat dengan penelitian Irvan & Karmini (2013) yang menyimpulkan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernita *et al.* (2020) yang menyimpulkan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut i) Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2018, maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini PAD sebagai sumber pendanaan utama tidak dapat menjadi penentu besarnya belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena belum optimalnya penerimaan PAD dapat dilihat dari data dari kementerian keuangan bahwa terdapat penurunan penerimaan retribusi daerah dan tidak tercapainya target pajak; ii) Dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2018, maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti. Penelitian ini memiliki kesimpulan dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal karena tidak semua dari komponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja modal. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh pengalokasian dari komponen dana perimbangan yang digunakan untuk pendanaan belanja modal belum dikelola secara maksimal untuk peningkatan infrastruktur. Belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2018, Hal tersebut dapat terjadi karena jika melihat data realisasi penggunaan belanja modal di DJPK Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada setiap tahunnya lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan, jadi pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur belum optimal sehingga dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi belum terjadi.

Saran

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang diharapkan akan ada penyempurnaan-penyempurnaan selanjutnya. Berikut keterbatasan penelitian menurut peneliti i) Rentang periode data realisasi anggaran Kabupaten Pesisir Selatan yang belum dapat diakses untuk seluruh tahun anggaran; ii) Seiring berjalannya penelitian, peneliti menyadari bahwa tidak semua komponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja modal sehingga dana perimbangan tidak dapat meng-

gambaran secara eksplisit bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Berdasar simpulan dan keterbatasan tersebut berikut saran yang diberikan peneliti; i) Bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memperbaiki akses masyarakat untuk melihat laporan realisasi anggaran pada setiap tahunnya agar tujuan transparansi dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan juga dapat memperbaiki pengelolaan dana untuk belanja modal secara optimal agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat; ii) Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator yang berkaitan langsung terhadap belanja modal yaitu Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk pendanaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan membantu pencapaian prioritas nasional. Dari tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus tersebut maka akan dapat melihat bagaimana hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, M. 2013. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Albari, A. F. 2021. Pengaruh Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018. *Skripsi*, STIE YKPN.
- Arsyad, L., & Sodik, A. 2014. Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Badrudin, R. D. M. S. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R. D. M. S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2017.

- Chalid, P. 2015. Teori Pertumbuhan: Teori Dan Isu Pembangunan.
- Chin, W. W. 1998. *Modern Methods for Business Research*.
- Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis. 2017. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum. 2004. *Dana Alokasi Khusus dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. 33, 1–13. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/DAK.pdf>.
- Ernita, D., Putri, O. H., & Sari, I. P. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jambi. *Jurnal AKRAB JUARA*, 5, 200–216.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>.
- Halim, A. 2008a. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. 2008b. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Unit Penerbit dan Percetakan STIMYKPN.
- Hastuti, P. 2018. Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Hidayat, A. 2017. *Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap)*. Statistikian. [https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#:~:text=Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono \(2004\) adalah%3A Teknik,agar diperoleh sampel yang representatif](https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#:~:text=Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono (2004) adalah%3A Teknik,agar diperoleh sampel yang representatif).
- Hoesada, J. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Irvan, I. putu, & Karmini, N. L. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal EP Unud*, 338–362.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Lampiran III PMK NO. 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/101~PMK.02~2011PerLamp III.htm>
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Marianus, M., & Badrudin, R. 2016) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 17, 81–98.
- Moha, M. M. B., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2004-2013. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10243.17.2.2015>.
- Nurhemi, & Suryani, G. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243.
- Pajak daerah*. 2018.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. 2017. Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Jour-*

- nal of Corporate Governance*. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. NOMOR 55 TAHUN 2005, 7. 2005.
- Raharja, T. L. C. 2020. *Pengaruh Dana Desa Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Dan Sulawesi Tahun 2015-2018*. Skripsi, STIE YKPN.
- Ricardo, D. 1817. *On The Principles of Political Economy and Taxation*.
- Salim, A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Inflasi Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 04(02), 164–179.
- Sasana, H. 2009. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 1–21. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/315>.
- Siahaan, M. P. S. . 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siswiyanti, P. 2017. Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–12.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2015. *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uu-33-2004.pdf>
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 9 Tahun 2015, 9 2015.
- Waryanto, P. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.34209/equ.v2i1i.628>.